

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJIYATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM
3. NHK : 932439

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI		Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI		Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	63.500.000
1. MOTOR, HONDA NF 125/KARISMA Tahun 2004, HASIL SENDIRI		Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI		Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2005, HASIL SENDIRI		Rp. 55.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	120.973.540
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	684.473.540
III. HUTANG	Rp.	2.264.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	682.209.540

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.